

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

PARTISIPASI KAUM DIFABEL DALAM PEMBANGUNAN DESA

INKLUSI TAHUN 2015

Pada bab ini akan disajikan data hasil wawancara dan analisis dokumen yang berkaitan dengan partisipasi kaum difabel dalam pembangunan desa inklusi yang berada di Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo. Penjelasan tersebut akan dibagi menjadi 2 pokok besar yang berkaitan dengan Partisipasi kaum difabel dan juga mengenai desa inklusi yang ada.

3.1 Data dan Informasi (Pendukung)

Istilah inklusi saat ini sering sekali kita dengar salah satunya adalah desa inklusi. Banyak program-program yang berkaitan dengan desa inklusi. Salah satunya oleh program peduli disabilitas dari Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Manusia dan Kebudayaan RI. Di beberapa daerah di Indonesia, sebagai respon adanya UU Desa dan memenuhi mandat dari Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dengan UU nomor 19 Tahun 2011

Hal tersebut tidak membuat seolah-olah permasalahan mengenai kesenjangan dengan disabilitas ini selesai, persoalannya kemudian masih terjadi kerancuan tentang konsep inklusifitas yang akan diterapkan pada suatu

desa. Hal ini terjadi tidak hanya pada masyarakat awam tapi kepada pemangku kebijakan dan penyandang disabilitas itu sendiri.

“Kebanyakan orang memandang inklusi hanya tentang pemberian layanan kepada penyandang disabilitas saja padahal tidak. Konsep Inklusi sebenarnya bisa dipahami sebagai pengakuan dan penghargaan atas keberagaman.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Hal yang disampaikan oleh Kepala Desa Sidoarjo tersebut memberikan pengetahuan bahwa memang konsep inklusi bukan hanya sebagai pemberian fasilitas tetapi memiliki makna yang sangat dalam. dalam hal tersebut pembangunan desa inklusi dapat diawali dengan banyak hal, akan tetapi data dan informasi menjadi salah satu hal yang sangat penting karena memang dalam data pertimbangan untuk melaksanakan pembangunan desa inklusi akan dengan mudah untuk dijalankan. Hal tersebut senada seperti yang dikatan oleh bapak sutrisna dalam lanjutan perbincangan.

“ ... yang dibutuhkan ya data dan informasi dulu mas, semua kan tidak bisa terjadi dengan tiba-tiba. Butuh proses, dan awalnya kita harus tahu terlebih dahulu mendapatkan sebuah alasan mengapa harus ada desa inklusi, dan itu bisa didapat dari data dan informasi.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Pendataan difabel dari desa merupakan sebuah langkah awal yang tepat untuk meningkatkan program desa inklusi yang bisa diikuti oleh kaum difabel. Pada dasarnya, Desa Sidorejo tersendiri merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lendah yang pada awalnya hanya tercatat 85 orang jumlah penyandang difabel. Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan yang cukup menyeluruh, ternyata terdapat 360 orang jumlah penyandang difabel (diakses dari <http://sidorejo-kulonprogo.sid.web.id/index.php/first> pada sabtu 18 juni 2016).

Jumlah 360 bukanlah jumlah yang sedikit, karena dalam kesehariannya diperlukan aktifitas-aktifitas yang tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri tetapi menyangkut kehidupannya dengan masyarakat dan juga pemerintah. pendataan dinilai sangat penting sebagai acuan untuk melakukan perubahan.

“Data yang kami peroleh ini alhamdulillah bisa didapatkan, dengan bantuan dari SIGAB ... Sehingga pada akhirnya kami bisa mengetahui bahwa ternyata tidak sedikit orang yang memiliki kebutuhan khusus dan pengakuan yang lebih dari masyarakat dan pemerintah ... Data yang harus dicapai bukan hanya data angka mengenai berapa orang difabel yang ada saja di Desa Sidorejo, akan tetapi bagaimana kebutuhannya kemudian bagaimana kebiasaan kehidupannya dan masih banyak lagi mas yang harus diperoleh” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Kelanjutan perbincangan yang menarik dari salah seorang kepala desa inovatif dalam persoalan desa inklusi. Walaupun dalam hitungan angka kemiskinannya Desa tersebut cukup tinggi, hal tersebut bisa dilihat oleh siapapun yang datang ke desa tersebut, dimana memang banyak sekali kehidupan masyarakat yang dinilai kurang layak dalam kehidupannya. Kehidupan bermasyarakatpun dinilai kurang setelah adanya informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Data yang didapatkan menjadi sebuah acuan untuk memacu penggerak desa dalam membangun desa inklusi.

Sedangkan di Desa Bumirejo, tidak terlalu berbeda dengan Desa Sidorejo walaupun jumlahnya terhitung lebih sedikit yaitu terdapat 178 penyandang yang sudah terdata dan memang angka disabilitas tersebut sudah di data secara rinci berdasarkan data yang diperoleh dari SIGAB Yogyakarta.

Tabel 3.1 Data Difabilitas Desa Bumirejo

Data Penduduk	Total	Laki-laki	Perempuan
Jumlah Penduduk	9152	4585	4567
Jumlah Penduduk Difabel	178	107	71
Jumlah penduduk usia anak-anak	1896	1002	894
Jumlah difabel usia anak-anak	35	21	14
Jumlah penduduk difabel yang memerlukan dan belum memperoleh alat bantu	8	5	3
Jumlah penduduk difabel yang memerlukan dan belum memperoleh jaminan kesehatan	20	11	9

Sumber : Temu Inklusi 2014 (SIGAB)

“Data yang diperoleh ini adalah pendataan yang dilakukan oleh SIGAB bersama pemerintah Desa, beberapa desa di Kecamatan Lendah memang di bantu oleh SIGAB sebagai pihak yang membantu terciptanya Desa Inklusi” (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Bumirejo Bapak Edy, beliau memang menjelaskan bahwa SIGAB memang menjadi pembantu pemerolehan data bagi desa untuk membangun desa inklusi, desa sebagai ujung tombak terdepan menjadi lingkup pemerintahan yang paling serius untuk melayani masyarakat.

Data yang diperoleh di Desa Bumirejo pun dinilai lebih lengkap baik dari segi jumlah difabel orang tua, remaja hingga anak-anak. Walaupun pembangunan desa inklusi ini banyak melibatkan kepada masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi untuk difabel anak-anak pun masih sangat perlu

untuk diperhatikan karena merekalah yang kedepannya akan mengenyam pendidikan dan hal lain yang serupa.

Selain itu jumlah penduduk difabel yang memerlukan dan belum memperoleh alat bantu perlu diperhatikan agar bisa dibantu, dan jumlah penduduk difabel yang memerlukan dan belum memperoleh jaminan kesehatan.

“ ... Memperhatikan keadaan suatu desa dengan banyaknya difabel didalam suatu daerah, seharusnya bisa membuat program lebih mudah untuk dibuat ... Warga disini memang banyak penduduk miskin nya termasuk keluarga penyandang disabilitas yang ada.” (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Berdasarkan data dari perbandingan mayoritas dan minoritas pemeluk agama, jumlah penduduk desa Sidorejo dari 14 dusun mencapai 7.855 jiwa, laki-laki 3932 jiwa dan perempuan 3923 jiwa dengan jumlah kepala keluarga tercatat 2.488 KK. Adapun jumlah kepala keluarga yang masuk dalam kategori miskin penerima bantuan beras, dari tahun ke tahun tercatat mengalami penurunan, dalam data terakhir pada 2012, jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 1.165 KK, dan jumlah terbanyak keluarga miskin berada di dusun Tubin dengan 138 KK. Desa Sidorejo dan Bumirejo memang tidak terlalu jauh berbeda dari segi ekonomi, penuntasan kemiskinan adalah hal yang sangat perlu untuk diperjuangkan, terkhususnya untuk kaum difabel.

3.1.1 Wadah/Organisasi berkumpul bagi warga Difabel.

Ada kelompok masyarakat yang masih memandang difabel sebagai kelompok yang mengharap belas kasih. Mereka memandang keterbatasan fungsi tubuh difabel merupakan penghalang bagi difabel untuk hidup mandiri, sehingga selalu memerlukan bantuan orang lain. Padahal, pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial tak bisa hidup sendiri.

Pandangan masyarakat yang negatif terhadap kelompok difabel menyebabkan kelompok tersebut sulit untuk mendapatkan kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan (Demartoto, 2005). Berbagai organisasi maupun perkumpulan kemudian dibentuk untuk mendukung kemandirian difabel.

“ Sebagai bentuk usaha untuk memajukan perubahan untuk kaum difabel, Desa Sidorejo membentuk forum perkumpulan sebagai cara untuk memberikan dampak positif untuk masyarakat yang dinamakan Forum Difabel Sidorejo ” (Bapak Wahyu Adi Nugroho., 28 Desember 2016)

Ungkapan perbincangan dengan salah seorang pengurus Forum Difabel Sidorejo (FDS) walaupun dengan kekurangan beliau/ sebagai orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik beliau mampu menjadi seorang Kepala Dukuh yaitu Bapak Wahyu Adi Nugroho di Dukuh Senden. Wadah ini menjadi sarana dalam berekspresi karena adanya kesamaan kondisi anggotanya.

Salah satunya adalah Forum Difabel Sidorejo, forum tersebut digunakan sebagai bentuk penguatan kaum difabel dalam menjalani kehidupannya. agenda-agenda yang ada pun dinilai sangat bermanfaat, baik untuk kaum difabel tersendiri maupun bagi masyarakat dan pemerintah Desa Sidorejo.

Seperti pada organisasi pada umumnya, Forum Difabel Sidorejo pun memiliki susunan kepengurusannya sebagai induk untuk menjalankan organisasi tersebut, adapun susunannya adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Sarjija
2. Sekretaris 1 : Santoso
3. Sekretaris 2 : Siti Musyafiroh
4. Bendahara 1: Rubinem
5. Bendahara 2 : Wening Handayani
6. Sie Humas :
 - a. Kelik Riyanto
 - b. Nur Sofiyah
 - c. Rabiun
 - d. Suparno

Membahas mengenai manfaat berada dalam naungan FDS, temuan dilapangan terhadap wawancara kepada beberapa narasumber adalah pengurus dan anggota yang lain mengaku mendapatkan kemudahan informasi mengenai agenda pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas maupun organisasi-organisasi yang ada. Manfaat lainnya, mereka mengaku merasa lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan lingkungan karena memang merasakan bahwa telah memiliki kekeluargaan yang cukup erat dengan sesama. Sebelum bergabung dengan FDS beberapa anggota dalam forum mengaku enggan bergaul bahkan cenderung lebih menyendiri. Mereka lebih memilih berdiam di rumah karena malu dengan kondisi diri.

Berbicara mengenai tanggung jawab contoh nyata yang ada adalah seperti Ibu Nur Shofiyah merupakan salah satu anggota yang direkrut sebagai seksi humas mengatakan dirinya siap menjalankan mandat yang diberikan FDS untuk melakukan koordinasi di tiga dusun. Nur juga mengakui pentingnya keberadaan organisasi difabel di desa Sidorejo.

“Alhamdulillah bagus, soalnya kalau tidak ada organisasi difabel seperti ini difabel tidak terurus, tidak ada tempat buat mengeluarkan unek-unek para difabel,” (Ibu Nur Shofiyah, 28 Desember 2016)

Organisasi ini dibentuk memang untuk memajukan kehidupan warga difabel tersendiri, keinginan dari pengurus tersebut diakui sendiri oleh pemerintah baik di tingkat Desa maupun Kecamatan. Bahkan ini

menjadi wadah kebersamaan yang bisa di contoh untuk Desa lainnya di Indonesia.

“ ... dulu yah mas, mau keluar rumah saja gaenak berasa malu. saya dulu awalnya kecelakaan jadinya kaki saya harus di amputasi dan sekarang memakai kaki palsu. tapi sekarang alhamdulillah lebih percaya diri untuk bisa berbaur dengan masyarakat dan bahkan bisa menjadi kepala dukuh.” (Bapak Wahyu Adi Nugroho, 28 Desember 2016)

Ucapan dari Pak Wahyu ini memberikan gambaran bahwa segala sesuatu yang ada dapat berubah, termasuk keadaan sosial dalam masyarakat dan pemerintah. Menjadi seorang yang memiliki kebutuhan khusus bukannya menjadi penghalang untuk menjadi sukses, cita-cita tetap bisa di raih dengan semangat yang tinggi dari kaum difabel itu tersendiri.

Dinaungi oleh pemerintah desa sidorejo, pada tahun 2014 FDS menjadi organisasi yang sangat produktif. Mereka memfasilitasi untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kaum difabel di Desa Sidorejo. Materi yang pernah diberikan terkait perekonomian, sekolah inklusi dan sosialisasi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) D.

Terkait pembuatan SIM D, beberapa difabel mengaku tak mengalami kesulitan. Dengan SIM D, difabel tak lagi takut kena tilang saat beraktivitas dengan roda tiganya. Hal ini kemudian akan mendukung kemandirian difabel dalam mobilisasi. Mereka juga rutin menjalankan arisan, kas dan tabungan. Mengenai jumlah rupiah yang dikeluarkan saat pertemuan, semua anggota merasa tidak keberatan.

Pasalnya, hal ini sudah menjadi pertimbangan sebelum mereka memutuskan untuk bergabung dengan FDS.

Tidak jauh berbeda dari Desa Sidorejo, Desa Bumirejo pun memiliki kelompok forum difabel sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan perwujudan inklusi. Organisasi tersebut dinamakan Kelompok Disabilitas Desa Bumirejo. Maksud, tujuan, dan fungsi dari kelompok ini memang tidak terlalu berbeda dengan FDS. Setiap Organisasi memang memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri tak terkecuali Kelompok Disabilitas Desa Bumirejo.

“Susahnya mengumpulkan orang yang mau berkumpul dan membantu keberlangsungan kaum difabel cukup sulit, tidak semudah seperti PKK, karang taruna ataupun lembaga yang di bawahi desa lainnya.” (Ibu Winarti, 17 Desember 2016)

Ungkap Ibu Winarti yang memang mendapatkan amanah untuk membawahi Kelompok Disabilitas Desa Bumirejo dari pemerintah Desa. Di awal pembentukan, anggota mereka hanya sedikit dan tidak semua aktif. Motivasi yang kurang, juga karena faktor kesibukan menjadi alasan. Perekrutan anggota Kelompok disabilitas Desa Bumirejo yang bersifat sukarela, seharusnya mampu menumbuhkan komitmen dalam kelompok. Upaya door to door dalam melakukan perekrutan menjadi pengentas krisis sumber daya manusia dalam kepengurusan KDD di tahun sebelumnya.

3.1.2 Hubungan Kaum Difabel dengan masyarakat

“Beberapa hal yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, adalah seperti adanya sistem sosial yang dalam kesehariannya ada interaksi dua orang atau lebih, Kehidupan bermasyarakat yang ada merupakan sebuah sistem sosial yang harus dapat dijalani.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Ungkapan Bapak Sutrisna menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo disebut sistem sosial karena di dalam masyarakatnya terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang tergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Masyarakat Desa Sidorejo dan Bumirejo Kecamatan Lendah, memiliki sistem sosial yang berbeda dengan yang lainnya. Karena masyarakatnya mempunyai hubungan interaksi yang cukup banyak dengan kaum difabel.

Sebagai contoh di Desa Sidorejo masyarakat yang berada di Pedukuhan Senden Khususnya, banyak sekali keterlibatan dengan kepala dukuhnya yang merupakan salah satu penyandang disabilitas. Akan tetapi warga pun tidak merasa ada hal yang aneh yang menjadikan itu perbedaan. Seperti ucap ibu Murjiati yang memiliki warung di daerah pedukuhan senden.

“Pak Dukuh alhamdulillah sangat baik, keterbatasan yang dimilikinya tidak membuat beliau patah semangat, bahkan beliau sudah bisa menjadi kepala dukuh dengan kemampuannya. Warga pun tidak ada yang merasa malu memiliki kepala dukuh seorang difabel, karena itu bukan alasan seseorang untuk berbuat baik.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Kaum difabel atau sering disebut masyarakat awam sebagai orang yang cacat merupakan salah satu anggota masyarakat. Mereka perlu diperhatikan seperti anggota masyarakat yang lain. Karena mereka adalah manusia yang sama seperti manusia pada umumnya, mereka tetap manusia yang mempunyai hak yang sama seperti manusia pada umumnya.

Pola pikir masyarakat yang menganggap adanya “manusia cacat” dan “manusia normal” mengakibatkan kaum difabel semakin tersingkirkan dan mengakibatkan timbulnya rasa rendah diri dalam diri mereka. Tidak adanya kesempatan dan kepercayaan terhadap kaum difabel kadang menjadi penyebab terasingnya kaum difabel dalam kegiatan bermasyarakat. Selain itu keterbatasan dalam diri difabel menjadi penghalang lain bagi mereka untuk ikut andil dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Secara garis besar, sikap dan pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas dapat dibedakan menjadi tidak berguna/tidak bermanfaat, dikasihani, dididik/dilatih, dan adanya persamaan hak.

“Alasan-alasan warga di Desa Bumirejo melihat kaum difabel macem-macem mas, ada yang berpikiran kalau cacat itu ya masalahnya makanya mereka ga bisa beraktifitas normal, ada juga yang berpikir bahwa masyarakat yang beranggapan

seperti itu yang salah nya, dan ada juga yang menerima keduanya.” (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Pak Edy kepala desa Bumirejo, memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas yang sudah ditemui. Sebagian kecil masyarakat ada yang menganggap jika kecacatan yang dialami oleh seseorang itu lah yang dianggap sebagai masalahnya, kenapa tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak, tidak bisa bersosialisasi dengan baik, dari sanalah beberapa masyarakat menganggap sumber permasalahannya.

Sedangkan pandangan lain menunjukkan bahwa permasalahannya bukan terletak pada kecacatan yang dialami oleh seseorang, tapi bagaimana cara pandang masyarakat yang negatif terhadap kaum disabilitas ini yang menimbulkan masalah. Sebagian besar pandangan masyarakat di Desa Sidorejo dan Bumirejo memperlihatkan adanya masyarakat inklusif yaitu bisa diartikan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat yang menghargai adanya perbedaan dalam kebersamaan. Adanya perbedaan antara kaya dan miskin, cacat dan normal ini dianggap sebagai sebuah hal biasa yang sudah membaaur dalam masyarakat.

Masyarakat menghargai hak-hak setiap individu dan mendorong setiap individu untuk berkembang lebih baik. Mereka juga menganggap jika setiap individu harus berprestasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan tidak harus disamakan dengan kemampuan orang lain, sehingga kehidupan harmonis pun dapat tercipta.

Masyarakat inklusi adalah masyarakat yang mampu menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat itu sendiri. Keberagaman disini meliputi : agama, budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, termasuk perbedaan fisik/mental atau disebut disabilitas. Apabila keragaman ini mampu diterima dengan baik dan dianggap sesuatu yang wajar maka masyarakat akan membangun sistem layanan, interaksi dan fasilitas yang memudahkan bagi semua orang termasuk orang-orang yang mempunyai hambatan dan kebutuhan khusus.

Kekurangan dan keterbatasan selalu dikaitkan dengan kaum difabel, sehingga timbul kesan bahwa kaum difabel adalah kaum yang lemah. Sehingga tidak jarang kehidupan kaum difabel menjadi terasing. Namun, hal itu tidak berlaku bagi masyarakat difabel Desa Sidorejo dan Bumirejo. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat difabel tentang keadaan yang menyimpannya.

Keterbatasan yang sudah menjadi hal yang tak terpisahkan dari masyarakat difabel tidak menjadikan mereka putus harapan, terbukti dengan mereka mendirikan organisasi untuk menaungi difabel, mereka memberikan gambaran bahwa mereka ingin maju seperti manusia pada umumnya, dan berhak mendapatkan pengakuan yang layak.

3.1.3 Program inovasi inklusi

Dalam perkembangannya pemerintah Desa Sidorejo dan Bumirejo mengungkapkan pernyataannya dengan pemaknaan desa inklusi dalam konsep dan implementasinya adalah sebagai berikut:

1. Desa yang mampu menerima keberagaman secara positif.
2. Desa yang mampu memberikan layanan dan ruang yang aksesibel untuk semua orang.
3. Desa yang memberikan ruang gerak, berkembang dan berpartisipasi aktif sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan keragaman dan kerberbedaan.
4. Desa yang mendorong masyarakatnya untuk positif dan berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan kemampuannya berdasarkan keragaman yang ada ada.
5. Desa tempat dimana semua orang tanpa terkecuali merasakan keamanan, kenyamanan dan perlindungan yang sama.

Sehingga bisa dikatakan desa inklusi bukanlah desa yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas tapi desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Roh dari inklusi adalah mendorong pemenuhan hak yang sama dengan layanan yang setara kepada semua orang termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan serta semua masyarakat yang menjadi bagian dari desa. Pada konsep inklusivitas tidak bisa dipisahkan dengan pembuat kebijakan, bagaimana para pembuat kebijakan mampu membuat kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan konsep “layanan yang setara”.

“Seperti contoh program Desa inklusi yang telah dilaksanakan oleh Desa Bumirejo adalah seperti pembinaan kelompok disabilitas yang dilakukan setiap bulan merupakan wujud dukungan dari pemerintah Desa Bumirejo mengenai keberlangsungan Kelompok Difabel Desa (KDD). Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KDD tahun 2016 yaitu budidaya ternak kambing dan pembuatan pakan ternak.” (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Adapun kegiatan yang lain selain pembinaan kelompok penyandang disabilitas yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu pelatihan pembuatan ternak, pemberian bantuan kepada kelompok anggota disabilitas, dan peningkatan kapasitas difabel. Inisiatif Desa Bumirejo yang dapat di contoh dalam Mendorong Layanan dan Program Inklusif adalah dengan hal sebagai berikut:

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Inklusif Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo

Organisasi/ Institusi	Program/ Kegiatan Inklusi
Pemerintah Desa	Mengalokasikan anggaran untuk pembuatan RAM di kantor pelayanan Desa realisasi diagendakan pada bulan Oktober 2016
Pemerintah Desa	Difabel desa dilibatkan dalam pertemuan musrembang desa untuk tahun anggaran 2016
Pemerintah Desa	Difabel desa dilibatkan dalam musyawarah pemilihan sekretaris desa
Pemerintah Desa	Difabel desa dilibatkan dalam musyawarah dusun tahun 2016
Puskesmas Lendah I	Mengadakan Program Pelatihan Kader Sehat Jiwa (Pendamping Difabel Psikotik/ODGJ) untuk desa Bumirejo
SD Butuh	Penerimaan Siswa difabel dengan total siswa sebanyak 15 orang
SMA Negeri Lendah	Menerima murid difabel
TK Diponegaran	Penerimaan siswa difabel usia anak-anak

Sumber : Temu Inklusi 2014

Beberapa program yang ada ini tentunya memiliki keunggulan tersendiri untuk para penyandang disabilitas seperti yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembuatan RAM di kantor pelayanan Desa karena hal tersebut bisa mempermudah pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Kemudian pemerintah Desa pun melibatkan kaum difabel dalam musyawarah pemilihan sekretaris desa, hal tersebut membuat hubungan kaum difabel dan pemerintah desa menjadi lebih baik lagi.

Musyawarah pembangunan desa merupakan sebuah awal mula bagaimana desa akan membuat program-program nya bagi masyarakat, tak terkecuali kaum difabel. Bagusnya, difabel desa dilibatkan dalam pertemuan musrembang desa untuk tahun anggaran 2016 yang menjadikan pemerintah desa tau kan kebutuhan ataupun program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.

Selain dari pemerintah desa, puskesmas pun memberikan pandangan yang patut diapresiasi karena mampu untuk mengadakan program pelatihan kader sehat jiwa (pendamping difabel psikotik/odgj) terkhususnya untuk desa Bumirejo. Selain dalam bidang kesehatan bidang pendidikan pun menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pendidikan sejak dini sangat dibutuhkan oleh anak-anak, tak terkecuali anak-anak dengan kebutuhan khusus nya, dan yang terjadi adalah adanya penerimaan siswa difabel dengan total siswa sebanyak 15 orang di tingkat sekolah dasar, dan juga terdapat penerimaan siswa difabel usia anak-anak di tingkat taman kanak-kanak.

Selain program-program tersebut terdapat program yang menarik adalah pembinaan kelompok disabilitas di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan setiap akhir bulan ini merupakan salah satu kegiatan rutin Desa Bumirejo. Kegiatan pembinaan kelompok disabilitas ini sudah dicantumkan dalam RPJM desa yang dilakukan setiap akhir bulan yang di ikuti kurang lebih sebanyak 45 anggota kelompok penyandang disabilitas.

"Kegiatan pembinaan kelompok difabel ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh desa karena demi kesejahteraan warga penyandang disabilitas bisa lebih meningkat." (Bapak Suparman, 14 Januari 2016)

Bapak Suparman merupakan kasi di bidang kemasyarakatan di Desa Bumirejo. Beliau menjelaskan mengenai pembinaan kelompok disabilitas yang dilakukan setiap bulan merupakan wujud dukungan dari pemerintah Desa Bumirejo mengenai keberlangsungan Kelompok Difabel Desa (KDD). Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KDD tahun 2016 yaitu budidaya ternak kambing dan pembuatan pakan ternak. Adapun kegiatan yang lain selain pembinaan kelompok penyandang disabilitas yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu pelatihan pembuatan ternak, pemberian bantuan kepada kelompok anggota disabilitas, dan peningkatan kapasitas difabel.

3.1.4 Monitoring dan evaluasi

Sesuatu hal penting yang harus diketahui adalah monitoring dan evaluasi hal tersebut dilakukan untuk mengetahui indikator capaian dalam menjalankan program desa inklusi.

"Selama beberapa bulan yang sudah kita lewati, kita ingin mengetahui capaian-capaian sementara yang sudah didapatkan, tantangan, dan proyeksi kedepan seperti apa. Dan evaluasi tentunya, menambah apa yang kurang." (Bapak Rohmanu Solikhin, 14 Januari 2016)

Terang Rohmanu Solikhin selaku manager program rintisan desa inklusi yang beberapa diantaranya berada di Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo. Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah sebagai refleksi untuk referensi program desa inklusi selanjutnya.

Program Rintisan Desa Inklusi telah berjalan cukup lama. Hasilnya, beberapa yang menjadi targetan telah dicapai, baik kualitatif ataupun kuantitatif dari program tersebut. Salah satunya pembentukan organisasi difabel atau Kelompok Difabel Desa (KDD) di desa yang menjadi lokasi program desa inklusi. KDD digagas oleh beberapa fasilitator dan kader desa setempat sebagai bagian dari implementasi program desa inklusi, dimana bertujuan untuk mengorganisir gerakan masyarakat dari akar rumput dalam membangun desa inklusi.

Sebuah organisasi difabel yang ideal menurut Rohmanu Solikhin selaku manager program rintisan desa inklusi adalah:

“Hendaknya tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang difabel yang memiliki kategori sama sebagai anggota di dalamnya. Semisal kelompok organisasi difabel netra tidak harus hanya orang-orang difabel netra. Namun menyesuaikan dengan konsep desa Inklusi itu sendiri sebagai suatu kondisi sosial masyarakat yang membaaur, tanpa memandang perbedaan.” (Bapak Rohmanu Solikhin, 14 Januari 2016)

Ia juga menambahkan bahwa partisipasi dari masyarakat non-difabel juga diperlukan untuk menghindari eksklusifisme di dalam organisasi difabel itu sendiri. Program Rintisan Desa Inklusi yang dikembangkan di desa, memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda satu sama lain.

Pemilihan fasilitator dan kader rintisan desa inklusi ataupun anggota dalam KDD dipilih atas dasar domisili dari masing-masing orang. Karena yang memahami kondisi di lapangan adalah orang-orang yang memang bertempat tinggal di desa itu sendiri. Semisal dalam pemenuhan hak ekonomi antara desa Sidorejo yang mayoritas mata pencahariannya bertani dan desa lain seperti desa Gulurejo yang mayoritas adalah pengusaha batik tentu akan berbeda dalam menerapkan strategi pelaksanaan program dan kerja-kerja organisasi.

Dari sana-lah kemudian peran KDD sebagai wadah yang mengakomodir aspirasi masyarakat desa. KDD dengan melakukan musyawarah mufakat, menggodok sebuah konsep untuk membuat sebuah program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa.

Dengan adanya KDD di masing-masing desa ini mampu mengorganisasi dan mengakomodir baik kebutuhan materiil seperti kebutuhan pengembangan perekonomian ataupun yang bersifat formil seperti pengembangan kapasitas difabel itu sendiri agar bisa mandiri. Tak hanya itu di tataran pemerintah mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dan menjadi kontrol pemerintah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.

Kaum difabel yang selalu dianggap kelas minoritas perlu untuk lebih diperhatikan, dengan pengorganisasian seperti di atas dapat terkontrol dan terjangkau oleh pemerintah. Rohmanu mengatakan bahwa apabila organisasi difabel bisa mengkomunikasikan segala aspirasi difabel juga meningkatkan kapasitasnya akan menjadi daya tawar kepada pemerintah. Hal tersebut semata-mata memang untuk suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, dengan terciptanya suatu tatanan sosial yang berpijak pada keseimbangan dan harmoni sosial.

3.2 Partisipasi/ Keterlibatan

Banyak hal yang orang pikirkan tentang penyandang disabilitas mampu memberikan kontribusi apa untuk pembangunan desa? bisa mengikuti kegiatan apa untuk desa? Stigma negatif untuk kaum difabel selalu begitu saja muncul seolah-olah hal itu adalah pernyataan yang benar, pernyataan-pernyataan dari orang yang hanya melihat kaum difabel sebagai orang yang tidak mampu berbuat banyak hal secara tidak langsung patut untuk diperbaiki.

Anggapan bahwa kaum difabel tidak bisa untuk melakukan banyak hal sudah banyak terjadi, padahal pada kenyataannya banyak hal yang sangat mungkin bisa dilakukan dalam pembangunan desa inklusi. Salah satu contoh adalah sikap pernyataan yang diutarakan oleh Ngadimin salah seorang perangkat Desa adalah sebagai berikut.

“Salah satu alasan kenapa masyarakat belum melibatkan penyandang difabel dalam pembangunan, adalah karena rasa kasihan. Masyarakat masih menganggap bahwa penyandang difabel masih menjadi sosok yang perlu dikasihani dan diberikan bantuan”. (Bapak Ngadimin, 17 Desember 2016)

Pandangan tersebut tentunya harus dapat diperbaiki, karena Desa Inklusi adalah desa yang mengakomodasi semua kebutuhan difabel baik dalam fasilitas maupun pelayanan. Banyak orang yang tidak setuju jika difabel hanya dianggap sebagai sosok yang perlu dikasihani dan dianggap tidak mampu berperan dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan pilar dari pembangunan nasional, sehingga pemerintah desa perlu melibatkan difabel yang berarti memberikan kesempatan kepada difabel berperan dalam pembangunan nasional. Peran difabel dapat dimulai dari hal-hal yang kecil misalnya melibatkan dalam pengurus karang taruna, Rukun Tetangga (RT) atau kegiatan sosial lainnya.

Berbeda dengan pernyataan Kristiningsih, salah seorang guru Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mengatakan jika difabel memang layak diberi kesempatan dalam pembangunan. Dia mencotohkan mempunyai seorang murid difabel tetapi prestasinya tinggi sering menang dalam berbagai lomba mewarnai dengan peserta non difabel. Hal ini tentunya membuktikan jika penyandang difabel bukan semata sosok yang patut dikasihani dan diberikan bantuan.

Secara lebih rinci bagaimana bentuk partisipasi kaum difabel dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti :

3.2.1. Pendidikan difabel

Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Kaum difabel pun memiliki kesempatan untuk dapat memiliki pendidikan secara utuh. Pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa. Maka dari itu pendidikan pun sangat penting untuk kebutuhan kaum difabel yang pada hakekatnya memiliki keterbatasan. Pada saat ini, dapat diakui memang sudah banyak berkembang pendidikan khusus bagi kaum difabel baik milik swasta maupun pemerintahan.

Pada hasilnya pun, banyak terlahir siswa berprestasi dari pendidikan tersebut. Maka dianggap sangat perlu kaum difabel mendapatkan pendidikan yang baik supaya tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat atas keterbatasannya. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan kaum difabel di Desa Sidorejo dan Bumirejo maka dapat dijelaskan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Bidang pendidikan pun menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pendidikan sejak dini sangat dibutuhkan oleh anak-anak, tak terkecuali anak-anak dengan kebutuhan khususnya” (Ibu Winarti, 17 Desember 2016)

Ungkap Ibu Winarti dalam pandangan mengenai pendidikan untuk anak difabel, dan yang terjadi sekarang adalah adanya penerimaan siswa difabel dengan total siswa sebanyak 15 orang di tingkat sekolah dasar tepatnya di SD Negeri Butuh Kecamatan Lendah, dan juga di tingkat yang lebih bawahnya terdapat penerimaan siswa difabel usia anak-anak di tingkat taman kanak-kanak yaitu tepatnya di TK Diponegaran.

Desa Sidorejo sendiri memiliki 3 kelembagaan pendidikan, diantaranya lembaga pendidikan formal dengan 7 gedung TK dan 7 gedung SD. Lembaga pendidikan nonformal terdapat 3 pondok pesantren dan 1 panti asuhan. Sedangkan untuk kelembagaan informal terdapat 3 PAUD.

Dalam wilayah lembaga pendidikan, Sumijan selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah Ledok melihat kondisi pendidikan yang ada di SD tersebut saat ini lumayan baik. Baik menurutnya ini yaitu mampu bersaing dan berkembang seperti sekolah-sekolah yang ada di kota. Ia melihat dari kualitas dari sifat dan perilaku siswa-siswainya yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang lebih dominan. Karena sekolahnya yang menanamkan nilai moral tersebut kedalam kurikulum proses pembelajaran. Namun ia sendiri masih merasa jauh dari apa yang ideal sebagai sebuah sekolah.

Sebagai kepala sekolah SD Muhammadiyah Ledok, ia memiliki pengalaman menerima siswa difabel retradasi mental dan daksa. Keputusannya dalam menerima siswa difabel waktu itu karena tindakan kemanusiaan, walaupun ia masih beranggapan bahwa SLB lebih kondusif menerima siswa difabel dibanding sekolahnya.

“Di sekolah ini terdapat satu siswa difabel retradasi mental,”
(Bapak Sumijan, 14 Januari 2017)

Beliau pun berkomitmen walaupun sekolahnya ditunjuk oleh dinas pendidikan melalui SK untuk menjadikan sekolah inklusi, ia siap menjalankan mandat tersebut. Dulu, sebelum pemerintah memberikan kebijakan kepada setiap sekolah untuk menerima siswa difabel, Ia pernah disuruh untuk menandatangani surat pernyataan dalam perjalanan dinas yang isinya menunjuk sekolahnya menjadi sekolah inklusi, dengan melalui tahap uji oleh pihak sekolah SLB.

“Kalau dari sana menyatakan iya memenuhi standar maka bisa jadi sekolah inklusi.” (Bapak Sumijan, 14 Januari 2017)

Dalam menangani anak difabel ia mengakui memang belum begitu paham banyak, dari situlah ia merasa membutuhkan penangannan khusus dan kerjasam dengan pihak yang berkaitan.

“Tidak mudah bagi guru biasa dalam menangani anak tersebut. Bahkan kadang anaknya masih kencing di celana, dan gurunya kadang juga harus menunggui di sampingnya dalam proses belajar mengajar. Belum bisa mandiri.” (Bapak Sumijan, 14 Januari 2017)

Sedangkan model pembelajaran untuk siswa difabel, ia menjelaskan setiap guru memberi pelajaran secara individu, semisal dalam belajar menulis yang harus perlu pendampingan khusus. Dan untuk model pembelajaran variable difabel lain, belum ada. Tapi untuk kedepan ia menegaskan akan membuka selebar-lebarnya untuk siswa difabel.

“Di sini memang belum masuk dalam kategori sebagai sekolah inklusi, tapi kalau memang ada siswa difabel yang ingin sekolah di sini, harus diterima, walaupun SK dari dinas pendidikan belum ada. Dan memang sudah ada anjuran dari dinas bahwa untuk semua sekolah tidak boleh menolak siswa difabel. Kalau dulu kan memang hanya sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi yang harus menerima, namun kalau sekarang sekolah harus menerima semua.” (Bapak Sumijan, 14 Januari 2017)

Sebagai contoh, ibu Sumini yang merupakan salah satu dari wali murid siswa difabel, yakni Rizki Agung Jati difabel autisme yang sekarang bersekolah di SLB Kasih ibu belum berani untuk menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Ia masih beranggapan bahwa sekolah umum tidak akan menerima anaknya. Di SLB sendiri ia belum merasa puas dengan pelayanan pendidikan yang diberikan untuk anaknya.

Selain lembaga pendidikan formal, di desa Sidorejo juga terdapat pondok pesantren Al-Ghifari yang diketuai Pak Sadiman. Ia beranggapan bahwa masyarakat sendiri cenderung memilih orang yang istilah yang digunakannya “siap saji.”

“Katakanlah bergaul yang ada manfaat buat mereka, jadi kalau yang kekurangan, punya kelemahan itukan membuang-buang waktu, dan merasa direpotkan. Baik itu dari orangtua yang memiliki anak difabel ataupun masyarakat itu sendiri ... Saya sendiri belum paham banyak. Yayasan saya memang sementara belum bisa menerima, sementara yang yatim-piatu itu banyak. Cuman kalau yang dipondok pesantren itu ada yang lama dalam berfikir.” (Bapak Sadiman, 14 Januari 2017)

3.2.2. Pekerjaan Difabel

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pekerjaan sangat dibutuhkan dimanapun, tidak terkecuali untuk kaum difabel. Rumit dan banyaknya kebutuhan manusia membuat pekerjaan selalu didambakan dan dicari. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk usaha mencapai tujuan. Walaupun dalam kondisi ketidak-sempurnaan secara fisik maupun mental, kaum difabel harus mempunyai pekerjaan. Berikut ini adalah pekerjaan kaum difabel menurut beberapa informan.

“Secara garis besar pekerjaan yang dimiliki oleh kaum difabel disini adalah menjadi seorang petani/ peternak saja. Itupun jika dinilai masih sanggup. memang ya kebanyakannya hanya diam di rumah saja mas. tetapi ya ada beberapa juga yang memiliki pekerjaan yang bagus seperti Pak Nugroho yang menjadi Kepala Dusun.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Bapak Wahyu Adi Nugroho, aktivis difabel asal Kulon Progo ini diberikan kepercayaan untuk memimpin sebagai kepala dusun. Ia siap melayani masyarakat, sekaligus mendorong perubahan desa menjadi lebih inklusif. Pekerjaan yang sangat jarang dimiliki oleh penyandang disabilitas lainnya ini sangatlah membanggakan.

Bapak Wahyu Adi Nugroho, seorang difabel daksa asal Lendah Kulonprogo telah berhasil membuktikan peran aktifnya di masyarakat sekitar. Ia terpilih menjadi Kepala Dusun Sendnen, Desa Sidorejo, Lendah Kulon Progo. Perjuangan Nugroho untuk mewujudkan kesetaraan dan mewujudkan masyarakat yang inklusif telah lama ia lakukan. Nugroho, sapaan akrabnya adalah sosok yang gemar bersosialisasi dan bermasyarakat. Ia mengaku sejak kecil memang sudah gemar aktif di karang taruna.

Kecelakaan yang terjadi saat Nugroho berusia 27 tahun tidak membuat nyali Nugroho menciut. Nugroho terus bergerak dan berusaha aktif di masyarakat. Nugroho tetap ingin bermanfaat bagi difabel dan masyarakat sekitarnya.

“Saya dari tahun 2009 sudah aktif dalam pendampingan teman-teman di komunitas difabel, terutama difabel yang mendapatkan pelanggaran seperti kekerasan seksual, korban perkosaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya. Saat itu bersama SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel).” (Bapak Wahyu Adi Nugroho, 28 Desember 2016)

Ungkap ayah dengan dua anak tersebut. Nugroho terus berjejaring dengan berbagai komunitas, ia sering aktif di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel.

“saya pernah mengikuti pelatihan paralegal, saat ini saya menjadi salah satu fasilitator desa untuk program rintisan desa inklusi (RINDI) yang kebetulan juga ditangani oleh SIGAB dan mencakup seluruh desa di kecamatan Lendah sejak dari bulan Juni sampai sekitar bulan Oktober tahun depan ... Waktu kemarin saya mendaftar jadi dukuh itu sebenarnya cuma coba-coba, saya ingin berpartisipasi dalam pemilihan dan pengen tahu saja dalam pemilihan itu masih ada diskriminasi nggak dalam penyaringan calonnya,” (Bapak Wahyu Adi Nugroho, 28 Desember 2016)

Nugroho percaya bahwa ia harus mencoba kesempatan yang ada untuk merasakan pengalaman. Ia mengaku tidak terhambat secara administrasi, Nugroho lalu mengikuti seleksi tes seperti calon yang lain tanggal 22 November lalu. Nugroho berhasil unggul di antara tiga calon kepala dusun yang lain.

“Dari empat orang tersebut, peserta pertama memperoleh nilai 49, kedua 60, dan ketiga 65. Sebenarnya kan yang dua itu masuk dalam persyaratan, tapi tetap yang paling tinggi saya. nilai saya kemarin 72 dan otomatis saya yang dijadikan kepala dusun”. (Bapak Wahyu Adi Nugroho, 28 Desember 2016)

Pada saat itu, sembari menunggu pelantikan berlangsung Nugroho segera menyusun beberapa rencana strategis agar inklusi di wilayahnya dapat segera terwujud.

“Isu inklusifitas dan partisipasi difabel pasti akan saya masukkan jadi program dusun. Paling tidak jadi role model bagi teman-teman yang lain. kebetulan di wilayah saya itu ada satu difabel netra, dua difabel grahita dan ada empat psizofrem. Ada beberapa juga difabel manula, tapi kebetulan belum saya update lagi datanya. Saya harus lihat lagi data-data itu biar lebih valid”. (Bapak Wahyu Adi Nugroho, 28 Desember 2016)

Nugroho memiliki rentang waktu yang cukup lama untuk membangun dusun dan terus berusaha mewujudkan masyarakat inklusi di wilayahnya. Kini usianya masih 37 tahun, sementara ia akan menjadi kepala dusun sampai usia enampuluh tahun.

“Secara umum harapan saya nanti di dusun saya, partisipasi difabel akan lebih meningkat, pembangunan di desa juga akan lebih inklusif dan memperhatikan kelompok-kelompok difabel baik dari aspek pembangunan fisik, maupun pembangunan nonfisik”. (Bapak Wahyu Adi Nugroho, 28 Desember 2016)

Aksesibilitas beberapa fasilitas umum yang ada di lingkungannya menjadi prioritas Nugroho untuk tahun-tahun pertama masa jabatannya.

“Tahun-tahun pertama ini nanti mungkin akan mengupayakan aksesibilitas di balai desa atau di puskesmas, kalau target waktu sebenarnya tidak terbatas, selama saya masih bisa berkontribusi, saya akan tetap terus mengusahakan,”. (Bapak Wahyu Adi Nugroho, 28 Desember 2016)

Terpilihnya Nugroho sebagai kepala dusun di Sindén, desa Sidorejo, Lendah Kulonprogo merupakan salah satu bukti difabel bisa menjadi pemimpin. Keberhasilan Nugroho dalam pemilihan kepala dusun dapat dijadikan role model agar dapat pula menjadi pendorong difabel lain untuk terus berpartisipasi dan berperan di masyarakat.

Selain dengan pekerjaan sebagai kepala dusun, ada pekerjaan seorang difabel lainnya yang cukup menarik yaitu menjadi seorang jurnalis desa yang terdapat di Desa Bumirejo.

“ ... Kalau di Desa Sidorejo ada Difabel yang kesehariannya yang menjadi seorang jurnalis Desa, Pekerjaannya itu sudah cukup lama dan tidak ada hambatan bagi dia untuk menjadi seorang jurnalis walaupun dengan keterbatasan yang dimilikinya”. (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Ungkap Bapak Edy selaku Kepala Desa di Desa Bumirejo, apresiasi dari masyarakatpun terus menambah. Hal tersebut membuktikan bahwa pekerjaan yang dimiliki memang bisa dikerjakan dengan baik jika ditekuni dan didukung oleh orang sekitarnya.

3.2.3. Religiusitas Difabel

Agama dapat membawa kedamaian bagi pemeluknya. Ajaran agama menuntun kehidupan manusia ke arah jalan kebenaran. Dalam agama terdapat perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus di tinggalkan. Selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, agama juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Kehidupan bermasyarakat harus berpedoman pada ajaran agama yang diyakini, supaya berjalan pada koridor yang benar sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam masyarakat.

Perwujudan dari umat beragama adalah ibadah. Berbagai macam bentuk ritual ibadah yang harus dilakukan umat beragama. Seperti: sholat, membaca kitab, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari umat beragama adalah menjalankan segala bentuk ritual ibadah tersebut dengan benar dan baik. Supaya dapat meraih tujuan beragama yaitu kedamaian dan surga. Selain itu, bentuk ritual agama tersebut dapat menciptakan budaya atau kebiasaan dalam masyarakat. Jadi agama mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Begitu pula kaum difabel, dengan keterbatasannya harus tetap menjalankan kewajiban agamanya sesuai dengan kemampuan. dimanapun letak beribadahnya mereka selalu berusaha untuk berpartisipasi dalam segala bentuk ibadahnya.

3.2.4. Peranan (*Role*)

Peranan adalah tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai satu kedudukan. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kewajibannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya. Peran seseorang ditentukan berdasarkan status. Untuk mengetahui peranan apa saja yang dilakukan kaum difabel dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Sidorejo dan Bumirejo dapat disimak melalui penuturan beberapa narasumber sebagai berikut:

Peranan dari seorang Ketua Forum Difabel Desa Sidorejo sangat berdampak bagi kaum difabel disekitarnya. Pak Sarjiya tinggal di dusun Sedan, Sidorejo. Laki-laki yang lahir pada 26 November 1970 itu tidak lupa peristiwa tanggal 26 Maret 1993 yang menjadikannya seorang difabel daksa, karena terjatuh dari pohon kelapa.

“Waktu kecelakaan tersebut saya berumur 23 tahun. Saya memiliki dua anak, yang satu difabel daksa seperti saya namanya Winarni (17) sekolah di SMAN Lendah. Anak satunya Ganjar Pangestu (11) sekolah di SD Muhammadiyah Ledok. Istri saya Sudarmini (33). Saya menikah di umur 28 tahun untuk yang pertama kalinya.” (Bapak Sarjiya, 14 Januari 2017)

Pak Sarjiya memulai pembicaraan tentang partisipasi difabel yang menurutnya sudah mulai terlihat sejak 2014, di dalam tingkat desa ataupun dusun. Ia sering terlibat dalam beberapa agenda pemerintahan desa. Karena sejak dulu ia sudah aktif di dalam karang taruna tingkat dusun. Bahkan sampai saat ini, karang taruna masih mengundangnya dalam berbagai event untuk memberikan wawasan kepada kepengurusan yang baru.

Selain hal tersebut, peranan yang diberikan dari kaum difabel yang ada di Desa tersebut adalah keterlibatan kaum difabel dalam musyawarah pemilihan sekretaris desa, hal tersebut membuat hubungan kaum difabel dan pemerintah desa menjadi lebih baik lagi.

Musyawarah pembangunan desa merupakan sebuah awal mula bagaimana desa akan membuat program-program nya bagi masyarakat, tak terkecuali kaum difabel. Bagusnya, difabel desa dilibatkan dalam pertemuan musrembang desa untuk tahun anggaran 2016 yang menjadikan pemerintah desa tau kan kebutuhan ataupun program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.

3.3 Akses Difabel

3.3.1. Kesetaraan akses layanan umum (sarana prasana)

Konsep kesetaraan ini dinilai menjadi penting, karena layanan yang sama pada semua masyarakat dikhawatirkan malah menyingkirkan masyarakat minoritas yang mempunyai hambatan dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu penting bagi pembuat

kebijakan untuk membuat langkah-langkah afirmasi untuk mewujudkan hal tersebut. Langkah-langkah afirmasi dapat dilakukan dengan memastikan sistem informasi dan data desa yang akurat, memberikan pengumuman secara terbuka, mendata ke rumah-rumah warga bahkan mendorong pelayanan langsung ke rumah bagi mereka yang tidak mampu keluar rumah karena hambatan mobilitas seperti kelumpuhan.

Selain itu bisa dengan menjamin partisipasi aktif golongan yang sangat miskin maupun penyandang disabilitas dalam kegiatan BUMDesa. Pendidikan usia dini di desa juga bisa menjadi inklusi dengan memberikan intensif kepada guru-guru PAUD yang bersedia menerima anak dengan HIV/AIDS, penyandang disabilitas, maupun kaum minoritas lain. Lebih jauh desa bisa menyediakan penerjemah bagi apabila warga akan melaksanakan kepengurusan kependudukan dari level desa sampai kabupaten. Untuk dapat dapat terwujudnya desa inklusi tersebut tentu saja harus ada dukungan dan komitmen dari semua pihak.

Desa Sidorejo, salah satu percontohan Desa Inklusi yang akan segera memiliki kantor desa yang aksesibel dengan universal desain. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sidorejo Bapak Sutrisno, dan sekarang sudah mulai terlihat ada beberapa perubahan seperti adanya penyangga dan kamar mandi yang bisa digunakan oleh kaum difabel. Sarana yang akan dibangun di Sidorejo, di antaranya bidang mirip (ramp), pintu masuk, dan toilet duduk.

Gambar 3.1 Kantor Desa Sidorejo yang Aksesibel



Gambar 3.2 Balai Desa Sidorejo yang Aksesibel



“Kita juga akan bikin kamar mandi yang aksesibel dan sesuai dengan standart aksesibilitas, misalnya dengan toilet duduk. Makanya kami akan melibatkan teman-teman difabel untuk bersama-sama membuat rancangan anggarannya.” (Bapak Sutrisno, 17 Desember 2016)

Sutrisno akan melibatkan difabel dalam merinci anggaran aksesibilitas. Sementara itu, Sarjiyo, salah satu warga difabel Sidorejo mengungkapkan bahwa awalnya, usulan mengenai pembangunan sarana yang aksesibel ini sudah diusulkan oleh kelompok difabel desa.

“Kemarin teman-teman difabel sudah mengusulkan dalam musremdes tentang adanya aksesibilitas. Akhirnya pemerintah desa menyetujui untuk segera membangun kamar mandi yang akses serta sarana aksesibel lain di lingkungan kantor desa,” (Bapak Sarjiyo, 17 Desember 2016)

Ungkap Sarjiyo yang baru-baru ini pulang dari Australia studi singkat tentang manajemen organisasi difabel.

“Kalau secara teknis untuk desain kami memang belum terlalu paham, namun kami mengusulkan agar nantinya kemiringan ramp tidak terlalu curam. Kami memang kemarin mengejar target agar bagaimana difabel di desa ini dapat terlibat dalam musremdes. Hal ini merupakan pintu pembuka agar difabel dapat lebih aktif dan lebih terlibat dalam pembangunan. Selama ini, yang terjadi kan memang salah satu faktor mengapa difabel jarang aktif karena faktor aksesibilitas kantor desanya” (Bapak Sarjiyo, 17 Desember 2016)

3.4 Regulasi

3.4.1 Regulasi yang mendukung.

Dalam pengembangan desa inklusi yang ada, setidaknya sudah ada serangkaian kebijakan yang mendukung inklusi dan kesetaraan difabel, seperti dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) yang secara menyeluruh menampilkan untuk mampu mewujudkan desa inklusi itu tersendiri.

Selain undang-undang tersebut, undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pun membantu kelangsungan inklusi ini bisa diwujudkan. Yogyakarta pun termasuk daerah yang benar-benar memperdulikan kesamarataan bagi penyandang disabilitas seperti dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan di Kulon Progo pun ada seperti Peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Maka dari itu peraturan daerah di beberapa provinsi dan kabupaten - kota yang secara khusus berpihak dan melindungi difabel. Adapun Peraturan atau Landasan Yuridis Inklusif lainnya yang bisa menjadi rujukan bagi pelaksanaan Desa Inklusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 31
 - a. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
 - b. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
 - a. Pasal 3

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

b. Pasal 5

- 1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
- 2) Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

c. Pasal 32

- 1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan.
- 2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami

bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
 - a. Pasal 5 “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

3.5 Anggaran

3.5.1 Perencanaan anggaran yang mengarusutamakan inklusi untuk difabel

Untuk mencapai program atau layanan tersebut tentunya perlu untuk mempertimbangkan alokasi pendanaan untuk kelancaran program atau layanan program desa inklusi tersebut seperti pengalokasian dana yang diberikan oleh pemerintah Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo yang mampu memperlihatkan transparansi pengalokasian dana untuk penyandang disabilitas.

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran oleh Desa Sidorejo

Tahun Anggaran	Program / peruntukan alokasi	Nominal
2015	Pertemuan Forum Difabel Sidorejo	Rp. 4.000.000
2015	Pemberdayaan Ekonomi	Rp. 40.000.000
Total Anggaran 2015		
Rp. 44.000.000		
2016	Pembangunan Aksesibilitas	Rp. 35.800.000
2016	Pertemuan Forum Difabel Sidorejo	Rp. 8.000.000
Total Anggaran 2016		
Rp. 43.800.000		

Sumber : RPJM Desa Sidorejo

Tabel 3.4 Alokasi Anggaran oleh Desa Bumirejo

Tahun Anggaran	Program / peruntukan alokasi	Nominal
2016	Pelatihan Pakan Ternak untuk Difabel & Pembelian Kambing	Rp 45.262.000
2016	Pembelian RAM	Rp 4.000.000
2016	Pembinaan Kelompok Difabel & Psikotik	Rp 11.009.000
Total Anggaran		Rp 60.271.000

Sumber : LPPD Desa Bumirejo

3.6 Problematika Kaum Difabel di tengah Masyarakat Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo

Dalam kehidupan masyarakat sudah pasti terdapat problematika atau masalah. Problematika tersebut bisa berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Kaum difabel di Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo juga mempunyai problematika sosial.

Problematika tersebut adalah sebagai berikut:

3.6.1 Penyimpangan kepada kaum difabel

Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang menjadi kesepakatan masyarakat. Penyimpangan biasanya ditujukan kepada orang yang lemah, baik dari fisik maupun psikisnya. Kaum difabel dipandang kaum yang lemah. Terkadang dari mereka ada yang menjadi sasaran penyimpangan.

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Sidorejo terdapat penyimpangan yang dilakukan salah satu warganya kepada kaum difabel. Bentuk penyimpangan atau perbuatan asusila yang dilakukan adalah menghamili salah satu kaum difabel.

“... Ada kejadian mas, salah satu warga di Desa Sidorejo yang menghamili warga difabel. sampai saat ini masih blm diketahui siapa pelakunya tapi kalau orang tersebut melihat pria yang dicurigai oleh warga nya itu dia pasrti langsung ketakutan”
(Bapak Sutrisno, 17 Desember 2016)

Perlakuan yang sangat disayangkan terhadap kaum difabel yang seharusnya memiliki perlakuan yang sama dalam semua aspek, termasuk perlindungan. Jaminan perlindungan harus didapatkan oleh kaum difabel sebagai upaya mewujudkan desa inklusi yang sesuai dengan aspek kemanusiaan.

3.6.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan problematika yang sering terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Kebanyakan masyarakat miskin berada di Desa. Begitu pula dengan masyarakat Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo yang masih banyak terdapat warganya yang berada di garis kemiskinan. Terutama warga yang menyandang difabel. Dengan keterbatasan fisik dan mental menjadikan mereka mempunyai pekerjaan yang rendah dan statis.

“ ... Memperhatikan keadaan suatu desa dengan banyaknya difabel didalam suatu daerah, seharusnya bisa membuat program lebih mudah untuk dibuat ... Warga disini memang banyak penduduk miskin nya termasuk keluarga penyandang disabilitas yang ada.” (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Berdasarkan data dari perbandingan mayoritas dan minoritas pemeluk agama, jumlah penduduk desa Sidorejo dari 14 dusun mencapai 7.855 jiwa, laki-laki 3932 jiwa dan perempuan 3923 jiwa dengan jumlah kepala keluarga tercatat 2.488 KK. Adapun jumlah kepala keluarga yang masuk dalam kategori miskin penerima bantuan beras, dari tahun ke tahun tercatat mengalami penurunan, dalam data terakhir pada 2012, jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 1.165 KK,

dan jumlah terbanyak keluarga miskin berada di dusun Tubin dengan 138 KK.

Desa Sidorejo dan Bumirejo memang tidak terlalu jauh berbeda dari segi ekonomi, penuntasan kemiskinan adalah hal yang sangat perlu untuk diperjuangkan, terkhususnya untuk kaum difabel. Penanganan secepatnya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan harus segala diselesaikan baik secara umum maupun terkhusus untuk difabel.

3.7 Perbandingan Capaian Temuan Inklusi Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Temuan Inklusi Desa Sidorejo Bumirejo

No.	Temuan Inklusi	Desa		Ketercapaian
		Sidorejo	Bumirejo	
1.	Data dan Informasi	Pendapatan data dan informasi sudah dijalankan dengan baik, tetapi masih belum terlalu lengkap. Forum difabel Sidorejo yang ada sebagai wadah organisasi difabel berjalan sangat baik dan di jalankan dengan aktif.	Kepentingan data dan informasi menjadi tujuan utama untuk dapat memberikan gambaran program inklusi kedepannya. Kelompok difabel desa bisa berjalan dengan baik dalam perjalanannya untuk mengembangkan potensi difabel.	Ketercapaian untuk Kedua Desa berda dalam kategori yang sudah baik, walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.
2.	Partisipasi/ Keterlibatan	Partisipasi/keterlibatan dalam perwujudan desa inklusi berjalan	Pelaksanaan partisipasi/keterlibatan sudah cukup baik,	Ketercapaian yang dijelaskan dalam penelitian

		baik. Dari bidang pekerjaan, pendidikan, religiusitas, dan peranan semua bisa terlaksana.	semua elemen dapat bekerjasama melaksanakan dan menerima keterlibatan kaum difabel, baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, religiusitas, hingga peranannya.	ini meliputi pendidikan, pekerjaan, religiusitas, dan peranan sudah cukup baik, semuanya dapat berjalan dengan penerimaan dari seluruh kalangan.
3.	Akses Difabel	Pembangunan infrastruktur desa dengan pembuatan RAM, tangga yang aksesibel, Kamar mandi yang ramah untuk difabel sudah dapat digunakan untuk kemudahan aktivitas difabel.	Akses sarana dan prasarana yang inklusif sudah mencapai pengerjaan, untuk memudahkan kaum difabel dalam menjalankan aktivitasnya.	Pembangunan Akses difabel terlebih dahulu sudah dilaksanakan di Desa Sidrejo dibandingkan Desa Bumirejo dalam pelaksanaannya.
4.	Regulasi	Regulasi hanya berdasarkan peraturan yang berada dalam lingkup nasional ataupun daerah, belum ada peraturan khusus dari desa yang dapat menjadi patokan desa inklusi.	Belum adanya regulasi yang khusus berada di tingkat desa, masih mengacu terhadap peraturan yang berada dalam lingkup yang lebih tinggi.	Regulasi (PERDES) masih belum tercapai, kedua desa masih belum memiliki aturan khusus dalam lingkup desa dalam pembangunan inklusi.

5.	Anggaran	Penganggaran untuk pembangunan desa inklusi sudah dijalankan oleh pemerintah desa sebagai penunjang pelaksanaan desa inklusi.	Anggaran untuk pembangunan desa inklusi sudah dijalankan untuk memenuhi keberlanjutan desa inklusi.	Capaian yang ada sudah baik, penganggaran kedua desa sudah ada dan dapat dioptimalkan dengan baik.
----	----------	---	---	--